KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR RI Desak PUIC bersikap terhadap isu pelanggaran HAM muslim Uighur
Tanggal : Senin, 25 Maret 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

DPR RI Desak PUIC Bersikap terhadap Isu Pelanggaran HAM muslim Uighur

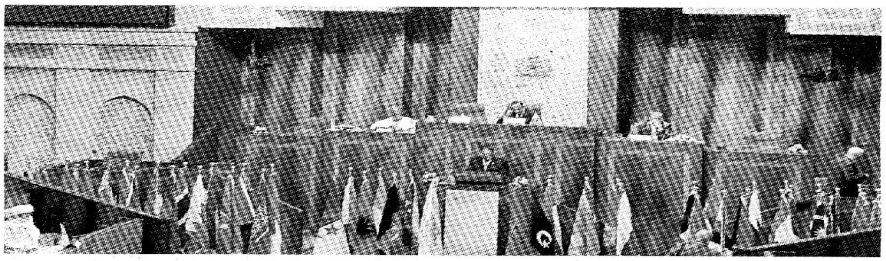

Isu tentang muslim Uighur di Cina masuk menjadi poin resolusi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14, di Rabat, Maroko, 11-13 Maret 2018.

Parlemen negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam), yang tergabung dalam PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States), harus bersikap tegas terhadap setiap bentuk diskriminasi serta marginalisasi yang diterima oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Itu sebabnya parlemen Indonesia mendesak agar PUIC memberikan sikap terhadap isu pelanggaran HAM yang menimpa muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina.

Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon menyatakan pada mulanya ditanggapi datar oleh delegasi parlemen negara-negara OKI lainnya. "Usulan Indonesia untuk memperhatikan isu muslim Uighur ini awalnya ditanggapi dingin oleh negara muslim lainnya. Bahkan sempat ditolak dengan alasan prosedural. Namun, karena lobi dan desakan kuat dari delegasi parlemen Indonesia, sidang General Committees akhirnya menyetujui untuk memasukan isu tersebut ke dalam *draft* resolusi akhir," jelas Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam ini.

"Bagi kami, delegasi parlemen Indonesia, sangat aneh jika negara-negara muslim tidak mengeluarkan sikap kolektif apapun terhadap isu tersebut, baik di forum eksekutif negara-negara OKI, maupun di forum parlemennya. Padahal, isu itu telah mendapat sorotan dunia internasional. Itu sebabnya kami ingin agar isu muslim Uigur ini masuk ke dalam resolusi," tambah Fadli.

Dalam sidang PUIC ke-14 ini, Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon didampingi oleh sejumlah anggota, yaitu Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Rofi Munawar (Fraksi PKS), Dwi Aroem Hadiatie (Fraksi Partai Golkar), Siti Masrifah (Fraksi PKB), Saniatul Lativa (Fraksi Partai Golkar), Achmad Farial (Fraksi PPP), dan Lalu Gede Samsul Mujahiddin (Fraksi Hanura).

Fadli menyampaikan lebih dari 60% konflik bersenjata, serta 70% serangan teroris, terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Menurut data UNHCR, bahkan lebih dari 65% pengungsi di dunia juga berasal dari negara-negara Islam. Itu sebabnya negara-negara OKI harus mendukung tumbuhnya gerakan solidaritas, termasuk kepada umat Islam yang menjadi minoritas di negara-negara non-OKI.

Latar belakang itulah yang telah mendorong delegasi DPR RI mendesak Sidang PUIC ke-14 agar mengeluarkan sikap tegas terkait pelanggaran HAM terhadap kaum muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Isu tersebut dianggap delegasi parlemen Indonesia sama pentingnya dengan isu kemerdekaan Palestina serta isu pembantaian, dan pengusiran etnis muslim Rohingya di Myanmar.

"Sebagai forum parlemen negara-negara Islam, PUIC memiliki tanggung jawab moral dalam menyikapi perlakuan diskriminatif yang sedang dialami kaum muslim Uighur. Kita harus membela dan melindungi masyarakat muslim yang hidup sebagai minoritas, seperti yang terjadi dalam isu Rohingya, dan kaum muslim Uighur di Cina. Ini bukan hanya soal solidaritas sebagai sesama muslim, tapi juga soal kemanusiaan yang lebih luas," ujar Fadli.

Delegasi parlemen Indonesia sangat memahami bahwa negara-negara anggota OKI umumnya memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Cina. Namun, hubungan bilateral tersebut seharusnya tidak membatasi negara-negara OKI untuk bisa bersikap tegas terhadap isu-isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM, apalagi yang menyangkut saudara-saudara sesama muslim.

"Setiap isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM, terutama yang menimpa umat Islam, seharusnya menjadi agenda perjuangan universal setiap negara OKI. Di sinilah PUIC, sebagai forum parlemen negara-negara Islam, dituntut memainkan perannya," sambung Fadli.

Hal itulah yang telah mendorong delegasi DPR RI meminta agar PUIC bersikap tegas dan aktif menggalang solidaritas. Jangan menutup mata terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Xinjiang, RRC," tutup Fadli Zon, yang juga Ketua Tim Diplomasi Parlemen Indonesia.

[*/Info]